

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemerintah Indonesia telah melakukan perubahan manajemen keuangan negara sesuai dengan fungsi, baik pada pemerintah pusat maupun pada pemerintah daerah. Agar terlaksananya secara optimal fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah diikuti dengan penatausahaan keuangan atas semua sumber-sumber penerimaan daerah semua sumber keuangan yang akan digunakan oleh daerah untuk membiayai kebutuhan daerah harus dapat dikelola dengan baik melalui penatausahaan yang tepat. Maka dari penatausahaan keuangan harus diperhatikan cermat dan dipahami bagaimana cara untuk penatausahaan terutama hal pengeluaran agar dapat menciptakan penatausahaan pengeluaran yang lebih efisien dan efektif.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Mengenai Keuangan Negara terdapat pengesahan di bidang pengelolaan keuangan bahwa kekuasaan pengelolaan keuangan negara adalah sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan dan kekuasaan pengelolaan keuangan negara dari presiden sebagai diserahkan kepada Gubernur/Walikota/Bupati selaku kepala pemerintahan untuk mengelola keuangan daerah dan dan mewakili pemerintah pusat dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah menjelaskan bahwa adanya pelimpahan wewenang atau kekuasaan dari pemerintah pusat kepada daerah untuk mengurus dan menyelenggarakan pemerintahan

daerahnya sendiri telah memotivasi bagi masing-masing daerah untuk lebih baik dalam pengelolaan wilayahnya agar dapat meningkatkan pertumbuhan pembangunan daerahnya masing-masing.

Untuk mengatur dan mengelola keuangan dibutuhkan nya bendahara, Bendahara sangat penting bagi instansi pemerintah hal ini dikarenakan bendahara selaku pengurus atau penanggungjawab dalam pengelolaan keuangan. Pada OPD Bendahara adalah PNS non struktural yang diusulkan dan ditunjuk oleh kepala OPD dan ditetapkan dengan keputusan Bupati dalam rangka mempertanggungjawabkan pelaksanaan APBD secara administratif kepada PA dan secara fungsional kepada BUD.

Dalam setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus mempunyai satu bendahara penerimaan dan satu bendahara pengeluaran serta dibantu oleh beberapa orang bendahara pembantu. Bendahara penerimaan bertanggungjawab atas setiap penerimaan OPD dan Bendahara Pengeluaran berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan setiap pengeluaran OPD sesuai dengan Mekanisme Penatausahaan Bendahara Pengeluaran yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan. Menurut Permendagri 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban bendahara serta cara penyampaian.

Mekanisme disini memiliki fungsi sebagai tata urutan pelaksanaan dan penatausahaan keuangan pada bendahara pengeluaran dalam melakukan penatausahaan secara efektif, sehingga menghasilkan laporan pertanggungjawaban keuangan yang efisien oleh bendahara pengeluaran.

Agar tercapainya pengelolaan keuangan yang efisien diharapkan setiap OPD terutama pada bendahara pengeluaran yang bertanggungjawab pada setiap pengeluaran OPD mampu menjalankan fungsinya sebagai bendahara pengeluaran sesuai dengan Mekanisme Penatausahaan Bendahara Pengeluaran yang telah ditetapkan .

Di mana Mekanisme Penatausahaan pada Bendahara Pengeluaran di OPD di dasari dengan ditetapkannya DPA-OPD dan telah ditetapkannya anggaran kas lalu diawali dengan diterbitkannya Surat Penyediaan Dana (SPD) sampai diakhiri dengan Surat Pertanggung Jawaban pengeluaran dana (SPJ).

Pemaparan di atas menunjukkan Mekanisme Penatausahaan Pada Bendahara Pengeluaran yang telah ditetapkan, oleh sebab itu demi tercapainya pengelolaan keuangan yang efisien, salah satunya dalam bidang penatausahaan bendahara pengeluaran yang menjadi tanggung jawab bendahara pengeluaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Dari uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui dan mengambil judul **“MEKANISME PENATAUSAHAAN PADA BENDAHARA PENGELUARAN UPTD BALAI PERLINDUNGAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SUMATERA BARAT”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian penjelasan latar belakang diatas tentang mekanisme penatausahaan pada bendahara pengeluaran, maka dapat dikemukakan rumusan masalah dalam penulisan tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana Mekanisme Penatausahaan Pada Bendahara Pengeluaran UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat?
2. Pembebanan apa saja yang mencakup tentang Mekanisme Penatausahaan Pada Bendahara Pengeluaran UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Magang

Untuk mengetahui bagaimana mekanisme penatausahaan pada bendahara pengeluaran yang dilakukan UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.

1.4 Manfaat Magang

1. Bagi Penulis

Untuk menambah pengetahuan dan wawasan dalam melakukan kegiatan serta mengetahui bagaimana Mekanisme Penatausahaan Pada Bendahara Pengeluaran UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat dan juga merupakan cara dan sarana untuk mengimplikasikan ilmu yang di dapat di Universitas.

2. Bagi Universitas Andalas

Kegiatan magang yang dilakukan diharapkan nantinya akan membantu Universitas dalam menghasilkan lulusan yang siap kerja dengan kompetensi dan keahlian yang dimiliki. terutama dengan pengalaman-pengalaman yang telah di dapat selama magang berlangsung sehingga hal ini akan memudahkan lulusan dari

Universitas Andalas untuk bekerja sesuai dengan bidangnya dari kebutuhan dunia kerja saat ini.

3. Bagi Instansi Tempat Magang

Terjalannya kerjasama dan hubungan baik antara Universitas dan Instansi terkait sehingga instansi terkait akan mendapatkan bantuan tenaga dari mahasiswa/i yang melakukan magang.

1.5 Ruang Lingkup Pembahasan

Mengingat keterbatasan waktu maka penulis membatasi penulisan laporan sebagai berikut:

1. Mengetahui mekanisme Penatausahaan pada Bendahara Pengeluaran UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.
2. Mengetahui pembebanan apa saja yang mencakup tentang Mekanisme Penatausahaan pada Bendahara Pengeluaran UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.

1.6 Tempat, Waktu, dan Kegiatan Magang

Kegiatan Magang ini dilakukan di UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat, dalam mengikuti kegiatan magang penulis berharap di tempatkan pada bagian-bagian yang sesuai dengan judul laporan magang dan dapat bersosialisasi dengan pegawai yang ada di UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.

Selama mengikuti kegiatan magang ini penulis berupaya memahami dan mempelajari Mekanisme Penatausahaan Pada Bendahara Pengeluaran UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.

Dalam Kegiatan magang yang dilakukan selama 40 hari kerja sekitar 2 bulan, penulis juga mendapatkan kesempatan berdiskusi dengan bendahara pengeluaran serta staff keuangan atau pegawai untuk memahami lebih lanjut tentang Mekanisme Penatausahaan Pada Bendahara Pengeluaran UPTD Balai Perlindungan Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Sumatera Barat.

1.7 Sistematika Penulisan

Agar laporan magang yang disajikan oleh penulis lebih terarah, maka penulis membuat sistematika penulisan laporan magang yang terdiri dari lima bab, di mana masing-masing babnya berisi beberapa sub bab yang saling memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, yang nantinya akan menjadi satu kesatuan kerangka karangan yang padu. Rinciannya adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini menjelaskan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, tujuan dilakukannya kegiatan magang, manfaat dilakukannya kegiatan magang, dan sistematika penulisan laporan.

BAB II Landasan Teori

Bab ini menjelaskan secara teoritis landasan materi tentang hal-hal yang berkaitan tentang Mekanisme Penatausahaan Bendahara Pengeluaran, Gambar Mekanisme Penatausahaan Bendahara Pengeluaran, Pejabat pelaksanaan Penatausahaan Pengeluaran, Dokumen yang digunakan

Penatausahaan Bendahara Pengeluaran, Mekanisme Penatausahaan pengeluaran Pembebanan, Mekanisme Penatausahaan Pengeluaran Pembebanan LS Gaji dan Tunjangan, Mekanisme Penatausahaan Pengeluaran Pembebanan Ganti Uang (GU), dan Mekanisme Penatausahaan Pengeluaran Pembebanan LS Barang&Jasa.

BAB III Gambaran Umum

Bab ini berisikan tentang penjelasan atau gambaran umum tentang sejarah berdirinya kantor, struktur organisasi yang ada didalamnya, sejarah berdirinya kantor, serta gambaran umum operasional kantor tersebut

BAB IV Pembahasan

Bab ini merupakan bagian yang berisi penjelasan tentang kegiatan magang yang telah dilakukan dan informasi yang diperoleh selama kegiatan magang berlangsung baik itu berupa informasi secara kuantitatif, kualitatif, maupun statistik.

BAB V Penutup

Bab ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan dan saran-saran dari pembahasan laporan yang telah disajikan. Saran - saran yang diberikan berguna untuk perbaikan dimasa yang akan datang baik itu bagi penulis, instansi pemerintah terkait, kampus, maupun pembaca.